

**PENGARUH DEMOKRASI, EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN DAN KUALITAS  
REGULASI TERHADAP TINGKAT PENGENDALIAN KORUPSI**

**(Tesis)**

**Oleh**

**MUHAMMAD IQBAL TAWAKKAL**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

# PENGARUH DEMOKRASI, EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN DAN KUALITAS REGULASI TERHADAP TINGKAT PENGENDALIAN KORUPSI

## Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh tata kelola pemerintahan yang diukur dengan tingkat demokrasi, efektivitas pemerintahan dan kualitas regulasi terhadap pengendalian korupsi. Sampel penelitian ini adalah 73 negara yang meliputi 23 negara maju, 27 negara sedang berkembang dan 23 negara miskin serta mewakili seluruh benua yang ada di dunia selama 5 tahun. Data diperoleh dari data bank dunia yang ada di Worldwide Government Indecator (WGI).

Pengujian digunakan regresi dan uji beda rata-rata. Hasil penelitian menemukan bahwa tingkat demokrasi, efektivitas pemerintahan dan kualitas regulasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat demokrasi. Namun bila diuji secara terpisah menurut kelompok negara maju, berkembang dan miskin terdapat perbedaan. Negara maju yang berpengaruh signifikan pada pengendalian korupsi adalah kualitas regulasi, negara sedang berkembang yang berpengaruh signifikan tingkat demokrasi dan efektivitas pemerintahan sedangkan pada negara miskin yang berpengaruh signifikan hanya tingkat demokrasi. Tingkat kemakmuran/ekonomi berkorelasi positif semua variabel independen dan dependen sehingga negara yang ekonominya lebih bagus menunjukkan tingkat variabel yang lebih tinggi baik pada tingkat pengendalian korupsi, tingkat demokrasi, efektivitas pemerintahan maupun kualitas regulasi. Hasil temuan ini dapat menjadi kebijakan dalam peningkatan pengendalian korupsi tergantung dalam kelompok negara mana sehingga kebijakan tersebut dapat lebih efektif.

Kata kunci: Tingkat Demokrasi, Efektivitas Pemerintahan, Kualitas Regulasi, Pengendalian korupsi.

# EFFECTS OF DEMOCRACY, GOVERNMENT EFFECTIVENESS AND REGULATION QUALITY ON CONTROL OF CORRUPTION

## *Abstract*

The purpose of this study was to examine the effect of governance as measured by the level of democracy, the effectiveness of government and the quality of regulations on controlling corruption. The study sample was 73 countries covering 23 developed countries, 27 developing countries and 23 poor countries and represented all continents in the world for 5 years. Data is obtained from world bank data in Worldwide Government Indicator (WGI).

Tests used regression and average difference test. The results of the study found that the level of democracy, government effectiveness and regulatory quality had a significant effect on the level of democracy. But if tested separately according to developed, developing and poor countries there are differences. Developed countries that have a significant influence on controlling corruption are the quality of regulation, developing countries that have a significant influence on the level of democracy and the effectiveness of government, while in poor countries the only significant influence is the level of democracy. The level of prosperity / economy positively correlates all independent and dependent variables so that countries with better economies show higher variable levels both at the level of corruption control, the level of democracy, government effectiveness and the quality of regulation. These findings can be a policy in improving control of corruption depending on which group of countries so that the policy can be more effective.

**Keywords :** Level of Democracy, The Effectiveness of Government, Quality of Regulations, Control of Corruption.

**PENGARUH DEMOKRASI, EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN DAN  
KUALITAS REGULASI TERHADAP TINGKAT PENGENDALIAN  
KORUPSI**

Oleh

**MUHAMMAD IQBAL TAWAKKAL**

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar**

**MAGISTER ILMU AKUNTANSI**

**Pada**

**Program Studi Magister Ilmu Akuntansi**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2019**

**Judul Tesis** : **PENGARUH DEMOKRASI, EFEKTIVITAS  
Pemerintahan dan Kualitas  
Regulasi Terhadap Tingkat  
Pengendalian Korupsi**

**Nama Mahasiswa** : **Muhammad Iqbal Jawakkal**

**Nomor Pokok Mahasiswa** : 1721031007

**Jurusan / Program Studi** : Magister Ilmu Akuntansi


**Fakultas** : Ekonomi dan Bisnis

**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**


**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Susi Sarumpaet, S.E., M.B.A., Ph.D., Akt.**  
NIP 19691008 199501 2 001

  
**Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si.**  
NIP 19750620 200012 2 001

**2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Akuntansi**

  
**Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si.**  
NIP 19750620 200012 2 001



## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji

Ketua : **Susi Sarumpaet, S.E., M.B.A., Ph.D., Akt.** .....

Sekretaris : **Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si.** .....

Penguji Utama : **Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt.** .....

Sekretaris Penguji : **Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Akt.** .....

### 2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

  
**Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.**  
NIP 19610904 198703 1 011

### 3. Direktur Program Pascasarjana

  
**Prof. Drs. Mustofa, M.A., Ph.D.**  
NIP 19570101 198403 1 020

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **8 Mei 2019**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil karya saya sendiri. Dalam tesis ini tidak terdapat keseluruhan ataupun sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya baik di dalam tulisan atau di daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Bandarlampung, 8 Mei 2019



Muhammad Iqbal Tawakkal

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Muhammad Iqbal Tawakkal lahir di Bandar Lampung pada 18 Februari 1995. Penulis lahir sebagai putra pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Tri Joko Prasetyo dan Ibu Marselina Djayasinga.

Penulis menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Kartika II-5 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2006.

Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2008. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas negeri (SMAN) 9 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2011. Tahun 2012 penulis berhasil lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru di Program Studi Teknik Geofisika Institut Teknologi Sumatera (ITERA). Penulis merupakan mahasiswa angkatan pertama di Institut Teknologi Sumatera (ITERA). Selama masa kuliah, penulis aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika Institut Teknologi Sumatera (ITERA) sebagai Ketua Himpunan Pertama pada periode 2013/2014. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dan lulus pada Bulan Mei 2019 dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) : 1721031007 .

Saat ini penulis bekerja sebagai Account Officer di Bank Pembangunan Daerah Lampung Kantor Cabang Utama.



## **MOTTO**

**“ Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar ”**

**(QS. Al-Baqarah : 153)**

**“ Dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari alam semesta”**

**(QS. Al-Ankabut : 6)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur atas segala ramhat dan nikmat yang telah dilimpahkan Allah SWT, kupersembahkan karya sederhana ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati untuk :

Kedua Orang Tua Ayahanda Tri Joko Prasetyo dan Ibunda Marselina Djayasinga, yang begitu luar biasa yang telah membesarkan dan mendidik anak-anaknya dnegan segala limpahan kasih sayang, doa, keikhlasan, ketulusan, kesabaran dan pengorbanan yang selalu diberikan dalam setiap langkah perjalanan hidup penulis. Terimakasih atas semua yang telah diberikan.

Adik-adikku Muhammad Ichsan Tawakkal dan Muhammad Ilham Tawakal yang selalu memberikan dukungan, semangat dan kehangatan di dalam kehidupan penulis, serta keluarga besar yang selalu mendoakan.

Dosen- dosen Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Universitas Lampung, serta teman-teman Magister Ilmu Akuntansi Universitas Lampung angkatan 2017 yang senantiasa memberikan saran, motivasi dan semangat dalam mengerjakan tesis ini.

Dan

Almamater kebanggaan Program Studi Magister Ilmu Akuntansi  
Universitas Lampung

## SAN WACANA

Segala Puji dan syukur penulis ucapkan bagi Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “ **Pengaruh Demokrasi, Efektivitas Pemerintahan dan Kualitas Regulasi Terhadap Tingkat Pengendalian Korupsi** ” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Akuntansi pada Program Studi Magister Ilmu Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ayah dan Ibu tercinta yang telah berjuang dan senantiasa mendukung, mendoakan serta menyayangi penulis dengan penuh kasih sayang.
2. Bapak Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
3. Ibu Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., selaku ketua program studi Magister Ilmu Akuntansi Universitas Lampung sekaligus

selaku Pembimbing II yang sangat perhatian dengan semua mahasiswa bimbingannya dan telah memberikan masukan dan koreksi sampai terselesaikannya tesis ini dengan baik.

4. Ibu Susi Sarumpaet, S.E., M.B.A., Ph.D., Akt. selaku pembimbing I yang begitu bijak dan telah membimbing serta banyak memberikan masukan dan koreksi sampai terselesaikan tesis ini dengan baik.
5. Ibu Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt. selaku penguji utama yang telah banyak memberikan masukan dan koreksi yang sangat bermanfaat dalam penyelesaian tesis ini dengan baik.
6. Bapak Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Akt selaku sekretaris penguji yang telah memberikan masukan dan koreksi dalam penyelesaian tesis ini dengan baik.
7. Seluruh dosen Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dan seluruh dosen Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
8. Seluruh staf dan karyawan Program Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung (Mas Andri, dkk) terimakasih atas pelayanan akademiknya.

9. Ichsan dan Ilham selaku adik penulis yang selalu mendukung, serta Indri Safitri yang telah mendukung dan mendoakan penulis dan sama sama berjuang untuk menyelesaikan tugas akhir.
10. Teman-teman seperjuangan di Magister Ilmu Akuntansi Universitas Lampung angkatan 2017 (Mas Eman, Mas Wayan, Mas Rahmat, Mas Irfan, Mas Berwin, Mas Syahrial, Mas Lukman, Mas Yuda) dan teman-teman yang lain semoga kesuksesan menyertai kita semua.
11. Almamater tercinta
12. Pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi Universitas Lampung dan pembaca.

Bandarlampung, 8 Mei 2019

Penulis



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	iv
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	v
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Masalah Penelitian .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Kontribusi Penelitian.....	8
<b>BAB II LANDASARAN TEORI .....</b>	9
2.1 Teori Keagenan .....	9
2.2 Teori <i>Stewardship</i> .....	11
2.3 Tata Kelola Pemerintahan .....	12
2.4 Teori Regulasi .....	16
2.5 Tingkat Pengendalian Korupsi.....	19
2.6 Demokrasi .....	21
2.7 Efektivitas Pemerintahan .....	22
2.8 Sistem Pengendalian Intern.....	23
2.9 Kerangka Pemikiran.....	26
2.10 Penelitian Terdahulu .....	26
2.11 Pengembangan Hipotesis .....	29
2.11.1 Pengaruh Demokrasi terhadap Pengendalian Korupsi.....	29
2.11.2 Pengaruh Efektivitas Pemerintahan terhadap Pengendalian Korupsi .....	31
2.11.3 Pengaruh Kualitas Regulasi terhadap Pengendalian Korupsi ..	32

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
3.1 Sumber Data.....	34
3.2 Populasi dan Sampel .....	34
3.3 Definisi Operasional.....	40
3.3.1 Pengendalian Korupsi .....	40
3.3.2 Demokrasi .....	41
3.3.3 Efektivitas Pemerintahan .....	42
3.3.4 Kualitas Regulasi .....	43
3.4 Alat Analisis.....	44
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
4.1 Deskriptif Statistik .....	46
4.2 Hasil dan Pembahasan.....	48
4.2.1 Uji Asumsi Klasik .....	48
4.2.1.1 Uji Normalitas .....	48
4.2.1.2 Uji Autokorelasi .....	49
4.2.1.3 Uji Multikolinearitas .....	49
4.2.1.4 Uji Heteroskedasitas.....	50
4.2.2 Uji Kriteria Pemilihan Model Penelitian .....	51
4.2.2.1 Uji Signifikansi <i>Fixed Effect</i> (Uji Chow).....	51
4.2.2.2 Uji Signifikansi <i>Random Effect</i> (Uji Hausman).....	52
4.2.2.3 Hasil Estimasi Regresi .....	53
4.3 Uji Hipotesis .....	55
4.3.1 Hasil Uji Parameter Individual .....	55
4.3.2 Hasil Uji F Statistik.....	57
4.3.3 Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	58
4.4 Uji Pengaruh Demokrasi, Efektivitas Pemerintahan dan Kualitas Regulasi terhadap Pengendalian Korupsi di Negara Miskin.....	59
4.5 Uji Pengaruh Demokrasi, Efektivitas Pemerintahan dan Kualitas Regulasi terhadap Pengendalian Korupsi di Negara Berkembang .....	61
4.6 Uji Pengaruh Demokrasi, Efektivitas Pemerintahan dan Kualitas Regulasi terhadap Pengendalian Korupsi di Negara Maju .....	63
4.7 Perbedaan Tingkat Demokrasi, Efektivitas Pemerintahan, Kualitas Regulasi dan Pengendalian Korupsi .....	65

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>67</b>
5.1 Kesimpulan .....	67
5.2 Saran.....	68
5.3 Implikasi.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	26
Tabel 4.1 Deskriptif Statistik .....	47
Tabel 4.2 Uji Multikolinearitas .....	50
Tabel 4.3 Uji Heteroskedasitas .....	51
Tabel 4.4 Hasil Uji Chow.....	52
Tabel 4.5 Hasil Uji Hausman.....	53
Tabel 4.6 Hasil Estimasi Data Panel dengan <i>Random Effect Model</i> .....	54
Tabel 4.7 Hasil Uji Parameter Individual Demokrasi.....	55
Tabel 4.8 Hasil Uji Parameter Individual Efektivitas Pemerintahan .....	56
Tabel 4.9 Hasil Uji Parameter Individual Kualitas Regulasi .....	57
Tabel 4.10 Hasil Uji Simultan.....	58
Tabel 4.11 Hasil Uji Regresi untuk Kelompok Negara Miskin .....	59
Tabel 4.12 Hasil Uji Regresi untuk Kelompok Negara Berkembang.....	61
Tabel 4.13 Hasil Uji Regresi untuk Kelompok Negara Maju.....	63
Tabel 4.14 Perbedaan Tingkat Variabel antara Negara Miskin, Negara Berkembang dan Negara Maju.....	66

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Lingkungan Akuntansi Keuangan (Wolk <i>et al</i> 2008) .....	16
Gambar 2.2 Kerangka Pikir Penelitian.....	26
Gambar 4.1 Uji Normalitas .....	49



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berita internasional yang sedang ramai disiarkan oleh berbagai media akhir-akhir ini antara lain kerusuhan di Venezuela akibat krisis ekonomi dan pangan serta ditangkapnya mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak karena korupsi di lembaga investasi Malaysia yaitu 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) senilai 700 juta dollar Amerika Serikat atau setara dengan Rp. 10 trilyun. Najib Razak menjabat sebagai perdana menteri Malaysia sejak 3 April 2009 sampai dengan 10 Mei 2018 atau selama 9 tahun. Pemerintahan Nazib Razak dengan partainya UMNO selama ini mendominasi secara mutlak parlemen dan dalam sejarah Malaysia belum pernah UMNO kalah dalam pemilihan parlemen yang akan memilih perdana menteri. Sebelum pemilihan umum dilakukan perdana menteri Najib Razak juga masih dengan percaya diri bahwa dia akan menang namun isu korupsi dan kondisi ekonomi yang menurun yang terus berkembang membuat rakyat marah dan baru sekali ini rakyat Malaysia berpaling dari partai yang selama ini memimpin Malaysia sehingga UMNO dengan perdana menteri Najib Razak kalah dalam pemilu di Malaysia.

Kejatuhan suatu pemerintahan karena korupsi hampir terjadi di berbagai negara di dunia termasuk di Asia Tenggara hal ini bukanlah yang baru karena sebelumnya

Presiden Philipina Ferdinan Marcos, Presiden Republik Indonesia Suharto yang telah memimpin selama 32 tahun, Perdana Menteri Thailand yang semuanya jatuh karena isu korupsi. Negara-negara lain yang mengalami hal sama cukup banyak sebagian besar negara-negara di Asia, Afrika, Amerika latin dan bukan hanya negara miskin negara maju juga terjadi kasus korupsi oleh pemerintahnya seperti di Korea, Italia dll.

Beberapa negara di Asia khususnya di Timur Tengah seperti Afganistan, Irak, Suriah dan beberapa negara di Afrika seperti Libia, Somalia, Mesir mengalami kehancuran akibat tata kelola pemerintahan yang jelek. Pemulihan kembali negara tersebut sangat sulit dan lama. Tata kelola negara yang buruk akan mengakibatkan pemerintahan yang diktator dan akhirnya menjalar ke bidang lain menjadikan semua tata kelola pemerintahan jauh dari ideal seperti munculnya korupsi, kolusi dan nepotisme.

Korupsi adalah tindakan yang dibenci dan dimusuhi oleh seluruh rakyat dimanapun karena korupsi dapat menyebabkan rendahnya tingkat investasi dan menurunkan pertumbuhan ekonomi (Mauro, 1995). Korupsi menyebabkan rendahnya pendapatan per kapita masyarakat (Treisman, 2000), korupsi menyebabkan rendahnya pertumbuhan ekonomi (Farooq dan Shabaz, 2013). Korupsi juga menyebabkan ketimpangan sosial (Gupta dan Davoodi, 2002). Akibat korupsi adalah rendahnya tingkat kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. IMF dalam sarannya kepada Indonesia untuk mengatasi krisis ekonomi 1997/1998 adalah Tata

kelola yang baik. Tata kelola yang baik harus diterapkan pada semua sektor baik di pemerintahan dan juga pada perusahaan.

Tata kelola pada prinsipnya adalah adanya Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Kewajaran (Effendi, 2004). Pada tata kelola pemerintahan maka bank dunia mengelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu pertama tentang bagaimana pemerintah dipilih, dipantau dan diganti yang menjadi indikator kelompok ini adalah tingkat demokrasi dan stabilitas politik. Kelompok kedua adalah kapasitas pemerintah membuat kebijakan yang baik dan transparan sehingga indikator kelompok ini adalah kualitas regulasi dan kelompok ketiga adalah bagaimana pemerintah menghormati warga negara dan mengatur interaksi ekonomi dan sosial masyarakat sehingga indikatornya adalah efektivitas pemerintah dan aturan hukum (Effendi, 2004).

Di Indonesia Tata Kelola telah berusaha diterapkan di semua sektor bila di sektor korporasi maka terdapat aturan dari Kementrian BUMN, peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan aturan dari Komite nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKG) untuk perusahaan swasta baik yang sudah *go public* maupun yang belum. Tata Kelola untuk sektor pemerintahan telah dijalankan dengan melalui berbagai undang-undang dan peraturan baik peraturan presiden, peraturan pemerintah, maupun peraturan pemerintah daerah. Pemerintah telah membuat UU tentang otonomi daerah dan keuangan daerah (Sedaryanti, 2009).

Prinsip transparansi di sektor pemerintahan terus dikembangkan sehingga penggunaan dan penerapan akuntansi keuangan pemerintahan terus dikembangkan sehingga dapat menjadi alat transparansi keuangan dan kebijakan keuangan baik untuk departemen/kementrian, institusi pemerintahan maupun pemerintah daerah. Regulasi telah banyak dikeluarkan untuk mengatur transparansi keuangan antara lain kewajiban setiap institusi pemerintahan apapun harus menggunakan dan menerapkan akuntansi yang baik. Akuntansi keuangan bukan hanya sebagai transparansi kebijakan keuangan juga telah menjadi alat penilai pertanggungjawaban kepala daerah atau suatu insitusi/ departemen hal ini terlihat bahwa semua pemerintah/ departemen akan berusaha mengelola keuangan dan akuntansinya secara baik sehingga opini akuntan dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan menjadi acuan yang penting. Peraturan seperti undang-undang dan peraturan pemerintah yang mewajibkan dan mendorong transparansi harus benar-benar kuat untuk medorong semua sektor melakukannya. Kualitas peraturan/regulasi seringkali juga menghadapi kendala karena adanya pengaruh ekonomi ataupun politis dari kepentingan berbagai pihak sehingga seringkali peraturan dibuat untuk kepentingan pihak tertentu dan ini merupakan masalah atau kendala dalam meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban. Bank dunia dalam membuat kriteria ukuran suatu tata kelola pemerintahan yang baik diantaranya diukur dengan kualitas regulasi.

Akuntabilitas adalah ukuran seberapa efektif semua sektor dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dalam rangka mencapai misi dan visi suatu negara atau wilayah. Pegawai atau orang yang ditunjuk harus benar-benar memiliki kompetensi

dan profesionalisme, tidak boleh terjadi adanya kolusi dan nepotisme. Efektivitas suatu pemerintahan sangat penting untuk menjadi pedoman pengelolaan yang baik. Pemerintahan yang efektif dapat meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat dan juga efektivitas pemerintahan meningkatkan pengendalian atas korupsi (Brewer *et al.*, 2007).

Independensi dan kewajaran adalah memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan, menyampaikan pendapat untuk kepentingan institusi serta memiliki tanggungjawab sosial dan harus menghindari dominasi yang tidak wajar oleh kepentingan pihak manapun sehingga hal ini kepentingan semua pihak menjadi hal utama. Bank dunia menyebutkan hal ini sebagai proses bagaimana pemerintah dipilih, dipantau dan diganti, ukuran dari tata kelola ini adalah tingkat demokrasi (Abdiweli dan Isse. 2003).

Penyebab korupsi dari beberapa penelitian bermacam-macam, pada intinya penyebab utama dari korupsi adalah tata kelola pemerintahan yang tidak baik. Prinsip tata kelola (*good governance*) baik untuk perusahaan maupun untuk pemerintahan di Indonesia mulai tumbuh pada tahun 1998 yaitu akibat krisis ekonomi tahun 1997/1998 yang mana pemerintahan orde baru yaitu presiden Suharto meminta bantuan IMF (*International Monetary Fund*) dimana salah satu syarat dari IMF adalah adanya tata kelola yang baik untuk perusahaan yang ada di Indonesia maupun tata kelola pemerintahan.



Treisman (2000) menemukan bahwa negara dengan nilai religi, sejarah peraturan Hukum Inggris yang ketat, negara yang maju maka tingkat pengendalian tingkat korupsi lebih tinggi sehingga korupsinya lebih rendah, Penelitian ini juga menemukan bahwa demokrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengendalian korupsi, hasil ini paradoks karena pemerintah yang korup adalah pemerintah yang otoriter dan biasanya mereka menumbangkan pemerintah otoriter yang korup dengan mengganti ke demokrasi dengan harapan mengurangi atau menghilangkan korupsi.

Penelitian Churchill, *et al.* (2013) menemukan bahwa faktor yang mempengaruhi pengurangan tindak korupsi di suatu negara adalah keterbukaan ekonomi, stabilitas politik, keberagaman etnis, sedangkan demokrasi dan kualitas regulasi berpengaruh tidak signifikan. Hal ini berbeda dengan temuan Turedi dan Altiner (2016) yang menemukan bahwa faktor yang mengurangi tindakan korupsi suatu negara adalah tingkat demokrasi, stabilitas politik, keterbukaan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi.

Krisis ekonomi dan politik yang terjadi di Indonesia seperti pada tahun 1965 kemudian tahun 1997/1998 menunjukkan penyebabnya tata kelola yang tidak baik yang terjadi pada tata kelola perusahaan dan juga tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang tidak baik menjadi penyebab utama yaitu tidak efektifnya pemerintah dalam menyediakan kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan, kesempatan berusaha, tingkat persaingan usaha yang tidak sehat maka membuat tingkat korupsi, kolusi dan nepotisme yang tinggi yang dilihat dari tuntutan rakyat

untuk pergantian pemerintah yaitu hapuskan korupsi. Tuntutan masyarakat atas pemerintah adalah peningkatan demokrasi, ketersediaan lapangan kerja serta kecukupan kebutuhan pangan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh tingkat demokrasi, efektivitas pemerintah dan kualitas regulasi terhadap tingkat pengendalian korupsi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kebijakan dalam pencegahan/pengendalian korupsi.

## **1.2. Masalah Penelitian**

Masalah pada penelitian ini adalah tentang pengaruh tata kelola pemerintahan yang baik dalam proksi demokrasi, efektivitas pemerintahan, dan kualitas regulasi terhadap tingkat pengendalian korupsi sehingga dapat diperinci sebagai berikut:

- 1) Apakah demokrasi berpengaruh positif terhadap tingkat pengendalian korupsi?
- 2) Apakah efektivitas pemerintahan berpengaruh positif terhadap pengendalian korupsi?
- 3) Apakah kualitas regulasi berpengaruh positif terhadap tingkat pengendalian korupsi?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh demokrasi terhadap tingkat pengendalian korupsi.
2. Menguji pengaruh efektivitas pemerintah terhadap tingkat pengendalian korupsi.
3. Menguji pengaruh kualitas regulasi terhadap tingkat pengendalian korupsi.

#### **1.4. Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini memberikan kontribusi kebijakan dan teori. Kontribusi atas kebijakan adalah untuk pembuatan kebijakan dalam rangka mencegah dan mengurangi tindakan korupsi yang banyak terjadi di negara-negara sedang berkembang atau negara miskin. Demikian pula di Indonesia walaupun sudah dua puluh tahun mengalami reformasi dan tingkat demokrasi sudah lebih baik namun tingkat korupsi masih banyak terjadi. Kontribusi teori adalah dalam pengembangan teori yang berkaitan dengan korupsi dan tata kelola pemerintahan sehingga teori dapat lebih berkembang.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Teori Keagenan**

Jensen dan Mekling (1976) mendefinisikan hubungan agensi sebagai suatu kontrak yang mana pihak berperan sebagai *principal* (pemilik) mempekerjakan orang lain sebagai *agent* (agen) untuk melakukan sejumlah jasa sesuai dengan keinginan mereka yang didalamnya termasuk pendelegasian kekuasaan untuk mengambil keputusan oleh agen. Kedua belah pihak dalam melaksanakan hubungan ini berusaha untuk memaksimalkan utilitasnya masing-masing sehingga agen akan bertindak dipercaya tidak akan maksimal bertindak untuk kepentingan pemilik. Masalah keagenan ini adalah bagaimana mengusahakan agar agen dapat bertindak maksimal untuk kepentingan prinsipal.

Hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya juga merupakan salah satu bentuk hubungan keagenan yaitu pemerintah merupakan agen yang melakukan tindakan untuk kepentingan prinsipal (rakyat yang seringkali diwalili oleh parlemen) agar pemerintah bertindak optimal untuk memakmurkan rakyat. Tindakan pengelolaan negara oleh pemerintah ini kemudian membutuhkan kontrol dan pengawasan dari pemilik (rakyat) selaku pemilik sumber daya modal.

Dalam teori keagenan ditegaskan bahwa pemisahan kepemilikan dan kendali perusahaan publik dapat menyebabkan manajer mengerjakan apa yang menjadi kepentingannya di atas kepentingan pemilik/pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976). Demikian pula dalam pemerintahan pemerintah selaku agen seringkali melakukan tindakan apa yang menjadi kepentingannya bukan untuk kepentingan rakyat selaku pemilik suatu negara. Rakyat sebagai pemilik suatu negara seringkali berusaha untuk melakukan monitor dan pengawasan yang diwakilkan pada parlemen dan Badan Pemeriksa/Pengawas Negara namun seringkali pemerintah selaku agen akan berusaha untuk mengintervensi pengawasan sehingga pengawassan berjalan dengan tidak baik dan pemerintah selaku agen dapat memaksimalkan kepentingannya di atas kepentingan pemilik (rakyat).

Eisenhardt (1989) menyatakan bahwa teori keagenan menggunakan tiga asumsi dasar sifat manusia yaitu ; (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*); (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai masa yang akan datang (*bounded rationality*); (3) manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut pemerintahan dalam mengelola negara akan cenderung memiliki sifat oportunistik yaitu bertindak untuk mencapai kepentingan diri sendiri.

Pemerintah sebagai pengelola negara memiliki informasi yang lebih mengenai keadaan negara dan prospek negara daripada rakyat. Krisis ekonomi di Indonesia yang terjadi pada tahun 1997/1998 menunjukkan bahwa pemerintah telah

mengelola negara dengan tata kelola yang tidak baik sehingga krisis ekonomi terjadi dan juga berimbas pada krisis politik dan krisis lainnya.

## **2.2. Teori Stewardship**

Teori *stewardship* awal mulanya dikemukakan oleh Berlee dan Means 1932 kemudian oleh Donaldson dan Davis pada tahun 1989, yang menyatakan penggambaran kondisi manajer yang termotivasi oleh target hasil utama kepentingan organisasi, bukan termotivasi terhadap kepentingan pribadinya (Donaldson dan Davis, 1989). Dasar dari teori ini adalah manajer melakukan suatu tindakan berdasarkan kepentingan bersama bukan berdasarkan kepentingan pribadi atau privat. Teori ini mempunyai dasar psikologi dimana *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai dengan keinginan *principal*, dan mencapai target dan sasaran organisasi, serta tidak akan meninggalkan organisasinya (Donaldson dan Davis, 1989).

Pada teori *stewardship* terdapat pilihan antara perilaku *self serving* dan *pro-organizational*, perilaku *steward* tidak akan dipisahkan dari kepentingan organisasi, sehingga meskipun kepentingan antara *steward* dan *principal* tidak sama, maka *steward* tetap akan menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Teori ini dapat diterapkan pada waktu hukum dan demokrasi suatu negara telah berjalan dengan baik dan dengan pengawasan yang tinggi, sehingga pemerintah mengutamakan tingkat kemakmuran dan kepentingan rakyat bersama, sehingga tidak terjadi konflik antara pemerintah dan rakyat.

### 2.3. Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan yang baik menurut BAPENAS (2008:9) mengandung makna pengelolaan pemerintahan yang baik yang merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan, tata pemerintahan, gagasan dan nilai-nilai untuk mengatur pola hubungan antar pemerintah, dunia usaha, swasta dan masyarakat. Sedangkan menurut *United Nations Development Program* (UNDP) dalam dokumen “*Governance for Sustainable Human Development*” (1997) mendefinisikan pemerintahan adalah suatu keterampilan dalam melaksanakan kewenangan/kekuasaan dalam bidang ekonomi, politik, dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan, persatuan dan kebersamaan sosial dalam masyarakat.

Prinsip yang harus dianut dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik menurut UNDP meliputi :

- a. Partisipasi yaitu setiap warga negara tanpa memandang gender memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan baik langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masing-masing.
- b. Regulasi hukum yaitu adanya kerangka aturan hukum dan perundang-undangan yang harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia.
- c. Transparansi yang harus ditegakkan dalam rangka kebebasan aliran informasi.

- d. Responsif yaitu setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).
- e. Berorientasi pada Konsensus (*consensus orientation*) yaitu pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus yang terbaik bagi masing-masing pihak dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah.
- f. Berkeadilan yaitu pemerintah yang baik selalu memberikan kesempatan yang baik bagi masyarakat lelaki maupun perempuan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas dan memelihara kualitas hidupnya.
- g. Efektif dan efisien yaitu setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan berbagai sumber yang tersedia dengan sebaik-baiknya.
- h. Akuntabilitas yaitu para pengambil keputusan sektor publik, swasta dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban kepada masyarakat umum sebagaimana mestinya sebagai pemilik kepentingan (*stakeholder*).
- i. Visi strategis yaitu para pemimpin memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pembangunan manusia bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

Lembaga Administrasi Negara (LAN, 2000) dalam kajiannya menyebutkan bahwa pemerintahan yang baik memiliki aspek sebagai berikut:

- a. Partisipasi



- b. Penegakan Hukum
- c. Transparansi
- d. Responsif
- e. Orientasi Konsensus
- f. Kesetaraan
- g. Efektivitas
- h. Akuntabilitas
- i. Visi strategis

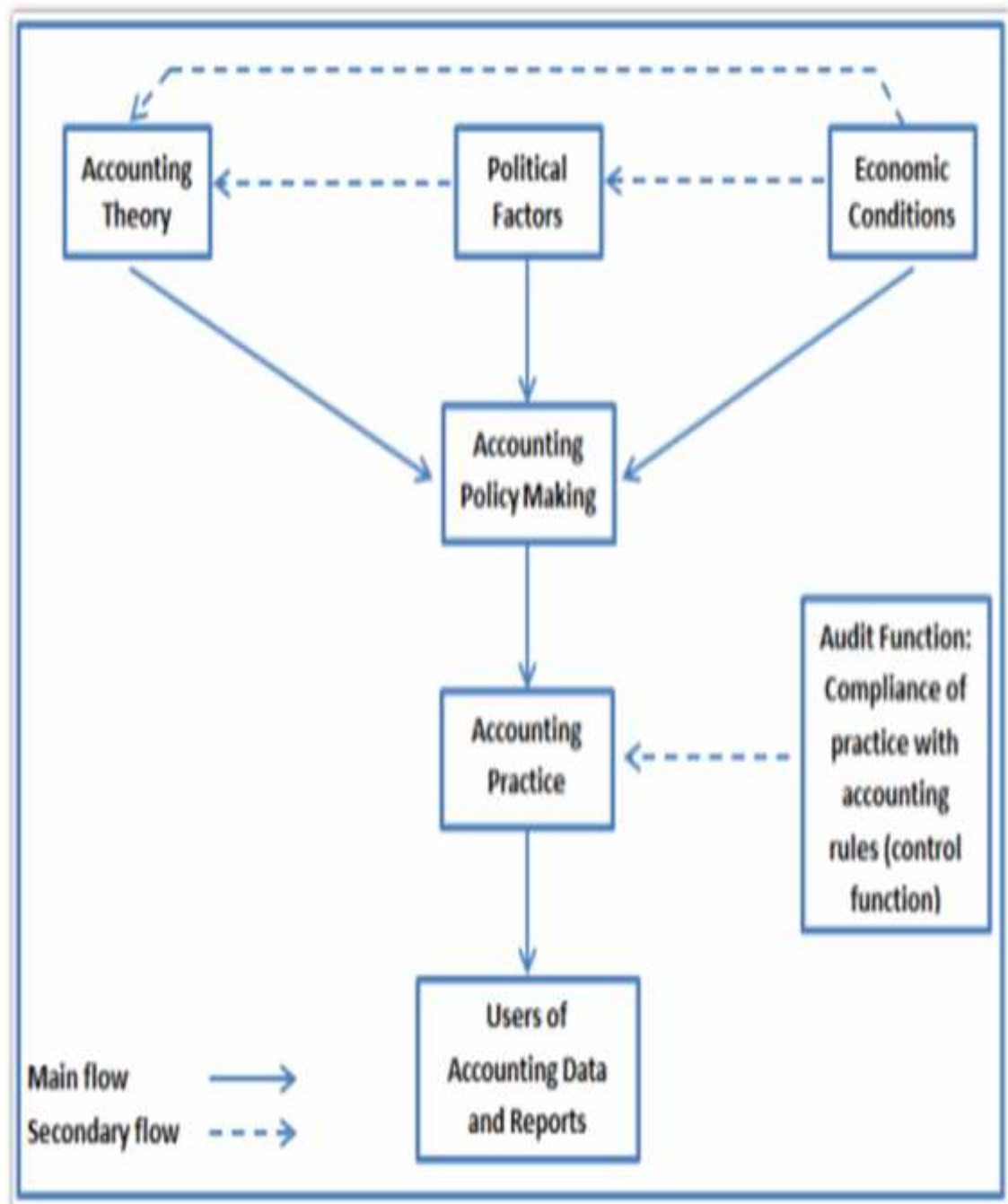
Jadi pada dasarnya hasil kajian LAN dengan UNDP serupa. Tata Kelola pemerintahan yang baik di Indonesia mulai marak setelah kejatuhan orde baru yang mana terjadinya krisis ekonomi tahun 1997/1998 yang merambah keberbagai bidang dan akibatnya begitu dirasakan seluruh masyarakat serta krisis ekonomi yang berulang pada tahun 2008 tidak lagi separah akibatnya seperti ditahun 1997/1998 karena tata kelola di Indonesia sudah mulai diterpkan. Tata kelola pemerintahan yang baik sangat diperlukan untuk menunjang keberlanjutan pembagunan. Tata kelola pemerintahan yang baik dapat mencegah terjadinya korupsi yang merusak perekonomian dan tata pemerintahan.

Masyarakat Transparansi Indonesia (2002) menyebutkan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik adalah suatu kesepakatan menyangkut peraturan negara yang dibuat bersama oleh pemerintah, masyarakat dan swasta tentang pembentukan seluruh mekanisme, proses, lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat dapat mengutarakan kepentingannya, menegakkan hukum, memenuhi

kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka. Tata kelola pemerintahan yang baik muncul akibat adanya ketidakpuasan pada kinerja pemerintahan yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik. Penyelenggaraan urusan publik yang sentralistik, non partisipatif serta tidak akomodatif menumbuhkan rasa tidak percaya bahkan antipati pada rezim yang berkuasa (Santosa, 2008).

Prinsip dasar dari tata kelola ada 4 (Sutedi, 2011) yaitu transparansi, akuntabilitas, kesetaraan (*fairness*) dan keberlangsungan (*sustainability*). Oleh Bank Dunia melalui indeks WGI (*Worldwide Governance indicators*) tata kelola dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu (1) proses bagaimana pemerintah dipilih, dipantau/diawasi dan diganti. Kelompok pertama ini merupakan cerminan partisipasi yang kemudian diturunkan dalam 2 indikator yaitu tingkat demokrasi atau kebebasan berpendapat dan tingkat stabilitas politik. Kelompok kedua mengenai kapasitas pemerintah untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan secara efektif dan transparansi dan hal ini mencerminkan adanya transparansi yang ditunjukkan dengan indikator kualitas regulasi, dan yang terakhir adalah institusi pemerintah yang mengatur interaksi ekonomi dan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencerminkan akuntabilitas pemerintah yang berisi indikator efektivitas pemerintahan dan aturan hukum.

## 2.4. Teori Regulasi



**Gambar 2.1. Lingkungan Akuntansi Keuangan (Wolk, *et al.*, 2008).**

Regulasi dibuat untuk kepentingan rakyat agar kehidupan menjadi lebih efisien dan efektif serta melindungi seluruh rakyat dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat. Namun pada prakteknya seringkali regulasi yang dibuat kualitasnya tidak

sebagus teori. Pembuatan regulasi selain berdasarkan teori juga dipengaruhi oleh faktor politik dan kondisi-kondisi ekonomi (Wolk *et al.*, 2008). Kondisi dan faktor ekonomi banyak mempengaruhi regulasi seperti adanya monopoli atau kartel, regulasi untuk kepentingan ekonomi penguasa seperti Paket Kebijakan Ekonomi V pada tanggal 22 Oktober 2015 yang tentang revaluasi aktiva tetap disebutkan bahwa tujuan revaluasi tersebut untuk meningkatkan kinerja perusahaan namun sesungguhnya kebijakan itu digunakan untuk menutupi kekurangan pajak dari target yang cukup besar sehingga yang mengikuti kebijakan tersebut hanyalah BUMN sebanyak 43 dan 19 anak perusahaan BUMN dengan penambahan pajak bagi negara sebesar Rp. 10,61 triliun (Kompas Rabu, 20 Januari 2016). Demikian pula dengan faktor politis yang begitu kuat mempengaruhi regulasi seperti tentang aturan otonomi daerah, keuangan daerah ataupun tentang ketentuan syariah yang regulasinya banyak dipengaruhi faktor politis.

Teori Regulasi terdiri *public interest theory* dan *interest group theory* (Scott, 2006). *The public interest theory* menyatakan bahwa regulasi atau aturan dibuat atas permintaan publik karena untuk perbaikan atas kegagalan pasar. Pada teori ini pusat otoritas atau yang sering disebut badan regulator diasumsikan memiliki kepentingan terbaik untuk seluruh masyarakat. Pada intinya teori ini menyatakan bahwa regulasi dibuat untuk kepentingan kesejahteraan sosial seluruh masyarakat. Teori ini adalah yang terbaik bahwa regulasi dibuat untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat namun seringkali banyak masalah dalam penerapannya. Salah satu masalah adalah siapa yang dimaksud dengan masyarakat karena masyarakat terdiri dari berbagai kelompok yang memiliki kepentingan berbeda.

Akibatnya seringkali regulator akan bertindak untuk kepentingan pihak regulator yang mengatasnamakan rakyat sehingga seringkali regulasi dengan kualitas terbaik ini sulit dicapai.

*The Interest Group Theory* yaitu menetapkan regulasi atau aturan yang dilihat dari kepentingan sekelompok pihak tertentu. Kelompok industri yang berkepentingan akan berusaha untuk mempengaruhi pihak regulator untuk membuat regulasi atau aturan yang menguntungkan pihak tertentu yang memiliki kepentingan. Contoh UU tentang kesehatan yang menetapkan bahwa yang boleh menangani masalah kesehatan dan membuat resep adalah dokter akibatnya apoteker ataupun perawat/mantri tidak boleh melakukan pengobatan sementara di kampung atau daerah terpencil tidak ada dokter dan selama ini perawat (mantri) yang menangani akibatnya seringkali timbul masalah di masyarakat seperti kejadian ditangkapnya seorang mantri oleh karena mengobati masyarakat padahal selama ini hal ini hal yang biasa terjadi ataupun masalah dengan sarjana apoteker yang tidak berfungsi optimal karena fungsi pekerjaannya untuk menentukan obat bagi suatu penyakit diambil alih oleh dokter yang lebih dominan dan memiliki kepentingan kelompoknya dari pada kepentingan masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa regulasi atau aturan merupakan suatu komoditi yang tergantung pada permintaan dan penawaran. Komoditi ini akan dialokasikan kepada pihak konstituen yang paling efektif secara politis dalam mempengaruhi pihak regulator. Oleh karena itu seringkali regulasi tidak efektif karena dibuat hanya untuk mengakomodasi kepentingan pihak tertentu yang belum tentu sesuai atau bahkan bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

## 2.5. Tingkat Pengendalian Korupsi

Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Korupsi adalah penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi (*abuse of publik power for private benefit*) (Churcill *et al.*, 2013; Liu, 2016; Turedi, 2016).

Korupsi merusak tatanan hidup masyarakat sehingga mengakibatkan ketidakadilan, ketidakefisienan, dan merusak pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Dari sudut pandang hukum, (Lubis dan Scot, 1993) menyebutkan korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan sendiri dengan merugikan orang lain oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atau tingkah laku mereka. tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut (Lubis dan Scot, 1993, Liu, 2016):

- a. perbuatan melawan hukum,
- b. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
- c. melanggar batas-batas hukum dan perkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
- d. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Jenis tindak pidana korupsi di antaranya, namun bukan semuanya (*worldwide government indicator*), adalah:

- a. memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan),
- b. penggelapan dalam jabatan,
- c. pemerasan dalam jabatan,
- d. ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara)
- e. menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya *pemerintahan oleh para pencuri*, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.

Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkoba, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kejahatan.

Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain. Tingkat

pengendalian korupsi mengukur sejauh mana kekuasaan publik digunakan untuk kepentingan privat, termasuk untuk kepentingan peran elit dan kepentingan privat. Tingkat pengendalian korupsi mengukur sejauh mana kekuasaan publik digunakan untuk kepentingan privat termasuk korupsi berbentuk kecil atau besar dan juga peran elit dan kepentingan privat (Bank Dunia/WGI). Tingkat pengendalian korupsi oleh Bank Dunia mengukur tingkat korupsi pegawai publik, persepsi investor asing terhadap korupsi di negara tersebut, frekuensi penggunaan “uang pelicin”, jumlah kasus korupsi hingga praktik-praktik yang tidak tepat pada pelayanan publik.

## **2.6. Demokrasi**

Demokrasi adalah indikator yang mengukur aspek proses kebebasan politik, kebebasan sipil dalam berekspresi dan berkumpul, kebebasan untuk memperoleh informasi dan menyampaikan informasi, kebebasan menyampaikan pendapat, transparansi dalam proses pemilihan pemerintahan, pergantian dan pengawasan pemerintahan (Abdiweli dan Isse, 2003; Brewer *et al.*, 2007; Turedi dan Altiner, 2000). Pemilihan aparatur pemerintahan harus dilakukan secara transparan dan dengan partisipasi masyarakat. Tingkat independensi pers dan kebebasan media untuk mencari ataupun memberitakan suatu informasi sangat penting dan menjadi tolak ukur atas tingkat demokrasi.

Turedi dan Altiner (2016) yang melakukan penelitian di negara-negara sedang berkembang menemukan bahwa tingkat demokrasi berpengaruh positif dalam pengendalian korupsi. Sedangkan Churchill *et al.* (2013) yang melakukan penelitian di berbagai negara menemukan demokrasi suatu negara tidak berpengaruh



signifikan terhadap tingkat pengendalian korupsi. Demokrasi selain itu merupakan bentuk proses bagaimana suatu pemerintahan dipilih, dipantau/diawasi dan diganti. Bila suatu pemerintahan dipilih oleh rakyat dengan kebebasan hak rakyat untuk memilih serta adanya peran yang mengawasi atau memonitor jalannya pemerintahan serta proses pergantian yang sesuai dengan kehendak rakyat banyak itulah salah satu bentuk demokrasi.

## **2.7. Efektivitas Pemerintahan**

Pemerintahan yang efektif adalah terbentuknya persepsi pada masyarakat tentang kualitas pelayanan pegawai publik (pegawai negeri) kualitas atas pelayanan pada masyarakat dan tingkat independensi dari tekanan politik kualitas perumusan dan implementasi kebijakan, kredibilitas pemerintah atas komitmen pada kebijakannya tersebut. Bank dunia menyebutkan beberapa indikator tentang pemerintahan yang efektif antara lain (*Worldwide Government Indicators*) :

- a. Kondisi sumber daya yang dimiliki seperti kualitas birokrasi/efektifitas institusi, infrastruktur,
- b. Kualitas primer pendidikan.
- c. Kepuasan terhadap sarana dan prasarana sistem transportasi
- d. Kepuasan terhadap sistem pendidikan
- e. Kondisi air bersih
- f. Tingkat kecukupan atas jasa kesehatan, listrik
- g. Kualitas birokrasi
- h. Kemampuan negara untuk menghadapi risiko emergensi seperti krisis ekonomi, kebutuhan pangan, penanganan terhadap bencana

- i. Stabilitas politik
- j. Kualitas administrasi publik seperti anggaran dan manajemen keuangan pemerintah.

Pemerintahan yang efektif adalah memiliki unsur-unsur:

- a. Partisipatif; membangun konsensus
- b. Responsif
- c. Transparan; efektif dan efisien
- d. Memiliki kesetaraan
- e. Bertanggungjawab
- f. Memiliki visi strategis.

## **2.8. Sistem Pengendalian Intern**

Sistem pengendalian intern merupakan suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan (Mulyadi, 2002).

Tujuan adanya pengendalian intern:

1. Menjaga kekayaan organisasi.
2. Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi.
3. Mendorong efisiensi.
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Sistem pengendalian intern dilihat dari tujuannya dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1) Pengendalian Intern Akuntansi (*Preventive Controls*)

Pengendalian Intern Akuntansi dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan perusahaan dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Contoh : adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi.

2) Pengendalian Intern Administratif (*Feedback Controls*).

Pengendalian Administratif dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.(dikerjakan setelah adanya pengendalian akuntansi) Contoh : pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada, untuk kemudian diambil tindakan.

#### Peran Sistem Pengendalian Intern

1. Membantu manajemen dalam mengendalikan dan memastikan keberhasilan kegiatan organisasi.
2. Menciptakan pengawasan melekat, menutupi kelemahan dan keterbatasan personel, serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan.
3. Membantu auditor dalam menentukan ukuran sampel dan pendekatan audit yang akan diterapkan.
4. Membantu auditor dalam memastikan efektifitas
5. audit, dengan keterbatasan waktu dan biaya audit

#### Keterbatasan Sistem Pengendalian Intern meliputi:

1. Kekeliruan pengoperasian sistem (*mistake in judgement*) karena terbatasnya informasi dan waktu, karena tekanan lingkungan, atau karena terbatasnya kemampuan, meskipun SPI sudah dilengkapi dengan pedoman penyelesaian masalah.

2. Pelanggaran sistem (*breakdowns*), baik disengaja atau tidak, misalnya karena kesalahan interpretasi, kecerobohan, gangguan lingkungan, perubahan personalia, atau perubahan sistem dan prosedur.
3. Kolusi, atau kerjasama negatif sekelompok orang.
4. Pelanggaran dengan sengaja oleh manajemen (*management override*)
5. Dilema biaya-manfaat (*costs versus benefits*)

Pengertian Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintahan menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah:

"Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan."

Keempat tujuan tersebut di atas tidak perlu dicapai secara khusus atau terpisah-pisah. Dengan kata lain, instansi pemerintah tidak harus merancang secara khusus pengendalian untuk mencapai satu tujuan. Suatu kebijakan atau prosedur dapat saja dikembangkan untuk dapat mencapai lebih dari satu tujuan pengendalian.

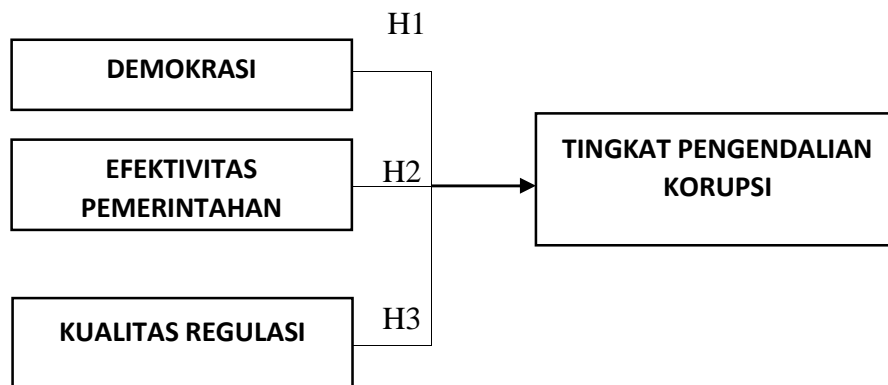
Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian

4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan pengendalian intern

## 2.9. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian teori maka dapat dibuat suatu kerangka pemikiran terhadap pengaruh tata kelola pemerintahan yang baik yaitu demokrasi, efektifitas pemerintahan, dan kualitas regulasi terhadap pengendalian korupsi sebagai berikut:



**Gambar 2.2. Kerangka Pikir Penelitian**

## 2.10. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Judul	Hasil
1.	Abdiweli dan Isse (2003)	Determinants of Economics Corruption: A Cross country Comparison	Faktor yang mempengaruhi korupsi antara lain: tingkat pendidikan, rezim politik, kebebasan ekonomi, tipe pemerintahan, etnik, efisiensi sistem hukum, kebebasan berpolitik dan ukuran pemerintahan. Hasil pengujian menunjukkan yang

			signifikan meningkatkan kontrol korupsi adalah tingkat pendidikan dan kebebasan ekonomi.
2.	Brewer <i>et al.</i> (2007)	Accountability, Corruption and Government effectiveness in Asia an Exploration of World Bank Governance Indicators	Menguji hubungan korupsi dengan variabel efektivitas pemerintahan dan demokrasi yang hasilnya menemukan efektivitas pemerintahan memiliki hubungan kuat dengan pengendalian korupsi.
3.	Churchill <i>et al.</i> (2013)	Corruption: A Cross Cuntry Analysis	Pengendalian korupsi dipengaruhi oleh faktor ekonomi seperti keterbukaan ekonomi rasio APBN/GDP, tingkat eksport, Sumber daya alam dan faktor non ekonomi yaitu demokrasi kebebasan pers, stabilitas politik, kualitas regulasi, tingkat urban, diversitas etnik penduduk. Hasil penelitian menemukan yang signifikan adalah keterbukaan ekonomi, kebebasan pers, stabilitas politik, tingkat urban dan diversitas etnik.
4.	Farooq <i>et al.</i> (2013)	Does Corruption impede economic Growth in Pakistan	Penelitian ini menemukan bahwa tingkat pengendalian korupsi dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi dan keterbukaan perdagangan.
5.	Gupta <i>et al.</i> ( 2002)	Does Corrrption Affect Income Inequality and Poverty	Penelitian ini menemukan bahwa korupsi mempengaruhi ketimpangan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.
6.	Liu (2016)	A Literature Review on the definition of Corruption and Factors Affectin the Risk of Corruption	Penelitian ini tentang studi literatur faktor yang mempengaruhi korupsi yaitu faktor makro, seperti kultur, politik dan pembangunan; faktor internal yaitu desentralisasi, gender, kontrol sosial, tingkat religi

			sejarah hukum inggris, Hasil penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor tersebut berpengaruh kecuali demokrasi yang pengaruhnya tidak signifikan.
7.	Shabbir dan Anwar (2007)	Determinants of Corruption in Developing Countries	Menemukan bahwa faktor ekonomi lebih signifikan dalam pengendalian korupsi daripada faktor non ekonomi. Faktor ekonomi tersebut antara lain kebebasan ekonomi, globalisasi perdagangan, tingkat pertumbuhan, distribusi pendapatan. Semua variabel berpengaruh signifikan. Sedangkan faktor non ekonomi seperti sosial politik, tingkat religi, demokrasi, kebebasan pers, agama mayoritas penduduk yang signifikan hanya tingkat demokrasi.
8.	Treisman (2000)	The Causes of Corruption: A Cross National Study	Faktor tradisi religi, sejarah aturan hukum inggris, perkembangan ekonomi, tingkat import, dan demokrasi, hasilnya semua variabel berpengaruh signifikan kecuali demokrasi.
9.	Turedi and Altiner (2000)	Economics and political Affecting Corruption in Developing Countries	Penelitian ini menemukan faktor ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, keterbukaan ekonomi, keterbukaan perdagangan meningkatkan tingkat kontrol pada korupsi namun inflasi mengurangi kontrol dari korupsi. Demokrasi dan stabilitas politik juga meningkatkan pengendalian korupsi.

## **2.11. Pengembangan Hipotesis**

### **2.11.1. Pengaruh Demokrasi Terhadap Pengendalian Korupsi**

Salah satu penyebab korupsi terbesar adalah pemerintahan yang otoriter (Fackler dan Lin, 1995; Brewer et al., 2007; Lederman *et al.*, 2005; Elbasani dan Sabic, 2017). Fackler dan Lin (1995) menyebutkan pemerintahan yang otoriter merasa paling berkuasa dan tidak ada pengawasan sehingga seringkali menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau keluarganya dan inilah hal utama dari korupsi. Kekuasaan yang berlebihan tanpa adanya pengawasan telah menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat seperti yang terjadi di negara Eropa Timur yaitu Rusia, Hungaria, Bulgaria Ceko, dll yang akhirnya runtuh dan beralih menjadi negara demokrasi baru dapat meningkatkan taraf hidup rakyatnya (Elbasani dan Sabic, 2017).

Demikian pula dengan negara Cina yang saat ini menjadi salah satu raksasa ekonomi dunia karena mulai terbukanya pemerintahan dan kesempatan ekonomi yang terbuka bagi masyarakatnya. Pemerintahan Mesir, Iran, Irak, Suriah, Libia, Uganda, Haiti dll jatuh karena pemerintahan yang diktator dan kebebasan hak suara rakyat tidak ada sementara pemerintahan dijalankan dengan bergelimang harta. Negara otoriter maka tata kelola pemerintahan tidak berjalan dengan baik sehingga pemerintahan tidak ada pengawasan dan tidak ada yang mengontrol (Fackler dan Lin, 1995; Elbasani dan Sabic, 2017). Kondisi suatu negara yang dipimpin dengan otoriter atau diktator, maka tidak ada pengawasan dan pemerintahan bertindak sewenang-wenang karena hukum tidak berjalan dengan baik akibatnya investasi rendah tingkat ekonominya selalu terbelakang (Bai dan Wei, 2000) seperti negara



Myanmar, Korea Utara ataupun Kuba dan negara besar seperti Rusia ataupun Cina dengan pemerintahan yang otoriter maka tingkat ekonomi rakyatnya susah dan banyak rakyat yang miskin. Rusia, Cina dan berbagai negara Eropa Timur dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidupnya setelah adanya keterbukaan dan kebebasan rakyatnya untuk berpendapat, berusaha. Rakyat yang melawan pemerintahan yang otoriter baik di Indonesia, Malaysia ataupun negara manapun selalu karena pemerintahan yang otoriter identik dengan korupsi hal ini karena tidak ada pengawasan akibatnya tata kelola pemerintahan tidak berjalan dengan baik sehingga rakyat menggugat untuk beralih menjadi negara yang demokrasi.

Treisman (2000), Lederman *et al.*, (2005) dalam penelitian di 54 negara menemukan ada pengaruh signifikan antara demokrasi dan korupsi. Lederman *et al.*, (2005) menyebutkan selain demokrasi juga sistem parlementer, stabilitas politik kebebasan pers dapat meningkatkan pengendalian terhadap korupsi. Demikian pula dengan hasil penelitian Churchill *et al.* (2013) yang melakukan penelitian di 133 negara bahwa demokrasi mengurangi tingkat korupsi secara signifikan. Demikian pula dengan penelitian Turedi dan Altiner (2016) menemukan bahwa demokrasi meningkatkan tingkat pengendalian atas korupsi. Demokrasi akan membuat adanya proses pemilihan, pengawasan dan pemberhentian pemerintahan secara transparan sehingga akan meningkatkan pengendalian atas korupsi, maka hipotesis penelitian ini:

H<sub>1</sub> :Tingkat demokrasi berpengaruh positif terhadap tingkat pengendalian korupsi.

### **2.11.2. Pengaruh Efektivitas Pemerintah Terhadap Pengendalian Korupsi**

Bank dunia menyebutkan pemerintah yang efektif adalah yang mampu menyediakan sarana, prasana dasar, sistem pendidikan, transportasi, tingkat kesehatan dan kesempatan berusaha. Badun (2006) menyatakan bahwa pemerintah yang efektif merupakan salah satu indikator kualitas pemerintahan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Kualitas pemerintahan yang efektif maka tingkat korupsi akan menurun. Churchill *et al.* (2013) hasil penelitiannya menemukan bahwa keterbukaan ekonomi dan kebebasan melakukan aktivitas ekonomi bagi rakyatnya menurunkan tingkat korupsi secara signifikan. Turedi dan Altiner (2016) juga menemukan dari hasil penelitiannya bahwa pemerintahan yang efektif dengan adanya pertumbuhan ekonomi keterbukaan ekonomi dan kebebasan aktivitas ekonomi menurunkan tingkat korupsi.

Penelitian Brewer *et al.* (2007) yang melakukan penelitian di 135 negara menemukan bahwa pemerintahan yang efektif maka meningkatkan pengendalian korupsi, sedangkan Amadou dan Sow (2017) yang meneliti di negara-negara Afrika menemukan bahwa efektivitas pemerintahan meningkatkan pendapatan negara dan juga pendapatan sektor pajak. Pajak dan perijinan merupakan 2 jenis yang dengan tingkat korupsi paling tinggi karena di 2 hal ini merupakan sumber negosiasi antara pemerintah dengan pengusaha tentang uang.

Susanto *et.al.* (2014) yang melakukan penelitian di Indonesia dengan sampel kabupaten dan kota menemukan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik dengan pemerintahan yang efektif maka meningkatkan kualitas pemberian layanan publik

daripada pemerintahan yang kurang efektif. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut;

H<sub>2</sub> : Tingkat Efektivitas Pemerintahan berpengaruh positif terhadap pengendalian korupsi

### **2.11.3. Pengaruh Kualitas Regulasi Terhadap Pengendalian Korupsi**

Huynh dan Chaves (2009) meneliti kualitas regulasi terhadap pertumbuhan ekonomi hasilnya menemukan bahwa kualitas regulasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Demikian pula dengan penelitian Churchill *et al* (2013) yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat korupsi diberbagai negara yaitu sebanyak 133 negara pada tahun 1996 sampai dengan tahun 2004. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kualitas regulasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat korupsi.

Tingkat transparansi dimulai dengan kualitas regulasi karena suatu negara yang otoriter maka tingkat transparansi dan kualitas regulasinya rendah. Negara-negara Eropa Timur ataupun Indonesia jaman orde baru regulasi penuh dengan kepentingan dengan kolusi dan nepotisme sehingga kualitas regulasi rendah akibatnya bisnis BUMN banyak digunakan sarana korupsi oleh keluarga ataupun kelompok penguasa, akibatnya BUMN tidak efisien sehingga krisis ekonomi yang terjadi di tahun 1997/1998 BUMN banyak yang tidak mampu bertahan dan mengalami kesulitan keuangan. Belajar dari kasus krisis ekonomi tahun 1997/1998 maka IMF mengajukan syarat adanya tata kelola pemerintahan dan tata kelola perusahaan yang baik bila mengharapkan bantuan IMF. Penerapan tata kelola yang

didalamnya termasuk kualitas regulasi yang baik di Indonesia maka terlihat krisis ekonomi tahun 2008 pengaruhnya tidak separah di tahun 1997/1998 dan bank yang mengalami kesulitan hanya beberapa saja antara lain Bank Century.

Dari beberapa hal tersebut maka hipotesis penelitian ini adalah :

H<sub>3</sub> : Kualitas Regulasi berpengaruh terhadap tingkat Pengendalian Korupsi.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan sumber data dari Bank Dunia yaitu *World Development Indicator* dan *Worldwide Governance Indicator*. Bank dunia membangun indeks ini sebagai hasil pengembangan dari penelitian Kaufman *et al.* (2010) yaitu tentang tata kelola pemerintahan yang dideskripsikan ke dalam tiga indikator yaitu pertama tentang proses bagaimana pemerintah dipilih, dipantau dan diganti, kedua kapasitas pemerintah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang baik secara efektif dan ketiga penghormatan kepada warganegara, mengatur interaksi sosial dan ekonomi.

#### **3.2. Populasi dan Sampel**

Populasi ini penelitian ini adalah semua negara di dunia di semua benua yaitu Asia, Eropa, Amerika, Afrika dan Australia baik terdiri dari negara maju, negara miskin, dan negara sedang berkembang. Adapun metode pemilihan sampel menggunakan metoda *cluster purposive sampling*. Sampel yang dipilih yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Negara tersebut mewakili benua Asia, Eropa, Amerika, Afrika dan Australia
2. Negara tersebut mewakili negara maju, negara sedang berkembang dan negara miskin

3. Data tersedia di Bank dunia yaitu di dalam *World Development Indicator* atau *Worldwide Governance Indicator*.

Indikator pengelompokan negara sebagai suatu negara ke dalam kelompok negara maju, berkembang, atau miskin, Bank Dunia memberlakukan dua kelompok indikator, yaitu :

**a. Indikator kuantitatif**

Indikator kuantitatif yaitu semua data dalam suatu negara yang dapat dihitung dan diperkirakan yang meliputi: (*World Governance Indicators*)

- a. Jumlah dan kepadatan penduduk
- b. Tingkat pertumbuhan penduduk
- c. Angka beban tanggungan
- d. Usia harapan hidup

**b. Indikator Kualitatif**

Indikator Kualitatif yaitu semua data dalam suatu negara yang hanya dapat dibandingkan saja yang meliputi: (*World Governance Indicators*)

- a. Etos kerja dan mindset (pola fikir)
- b. Kualitas dan kuantitas pendidikan
- c. Tingkat kesehatan dan kesejahteraan
- d. Tingkat kesadaran hukum
- e. Mata pencaharian.
- f. Pembangunan manusia dalam suatu negara

Dilihat dari sektor keadaan ekonominya, Bank Dunia menetapkan pendapatan negara per kapita yang tinggi kepada suatu negara yaitu sama atau lebih tinggi dari \$ 11.456 dengan pendapatan yang stabil atau meningkat. Sedangkan jika dilihat dari tingkatan industrinya, negara maju sudah kuat merambah pada industri tersier sementara negara berkembang masih kental dengan sektor agraris dan maritimnya. Sebuah parameter yang digunakan untuk mendefinisikan suatu negara sebagai negara maju atau negara berkembang atau negara miskin, pertama kali dikenalkan oleh UNDP (*United Nations Development Program*) yaitu menggunakan konsep HDI (*Human Development Index*).

Konsep HDI (Pembangunan Manusia) merupakan konsep yang meletakkan manusia sebagai unsur utama dalam pembangunan sebuah negara. Ini berkaitan dengan peningkatan kualitas nyata pada segi kehidupan manusia yang diukur dari peningkatan mutu hidup dan jumlah pendapatan. Berdasarkan hal tersebut, pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang penting, namun itu tidak cukup untuk menggambarkan kondisi pembangunan manusia secara keseluruhan.

*Human Development Index* merupakan indeks yang berfungsi untuk menggambarkan tingkatan rata-rata usaha suatu negara dalam menyediakan :

“Hidup sehat dan panjang umur”. Usaha ini dapat diukur dari angka harapan hidup pada saat kelahiran dan bisa diperoleh dari Divisi Kependudukan PBB. “Akses mendapatkan ilmu pengetahuan”. Usaha ini dapat diukur dan diperoleh dari UNESCO berdasarkan tingkat melek huruf dewasa dan kombinasi tingkat partisipasi warga negara di Sekolah Dasar, Sekolah Menengah, dan Perguruan

Tinggi. “Standar kemakmuran hidup”. Usaha ini dapat diperoleh dari Bank Dunia dengan memperhatikan penghasilan per kapita negara. Dari ketiga dimensi di atas, terbentuklah indeks yang berkisar antara 0 sampai 1. Pengelompokan indeks pada tahun 2009 terbagi menjadi 3 golongan, yaitu :

HDI tinggi, yaitu 0.800 - 1.000 (negara maju)

HDI sedang, yaitu 0.500 - 0.800 (negara berkembang)

HDI rendah, yaitu 0 - 0.500 (negara miskin)

Negara maju, berkembang dan miskin menurut Bank Dunia(*World Governance Indicators*) :

#### 1. Ciri-ciri negara maju

- a. Memiliki pendapatan per kapita yang tinggi.
- b. Memiliki tingkat kesehatan yang tinggi dan tingginya angka harapan hidup.
- c. Memiliki kualitas pendidikan yang baik yaitu dengan ditandai adanya tingkat melek huruf yang baik serta partisipasi bersekolah yang tinggi.
- d. Memiliki tingkat kesejahteraan hidup yang baik.
- e. Tingkat kelahiran dan kematian yang rendah.
- f. Perekonomian dilakukan dengan berbasis industri, perdagangan, dan jasa.
- g. Menguasai pasar modal dan teknologi yang mutakhir.
- h. Kedisiplinan dan keteraturan dalam kehidupan sosial.
- i. Tingginya kesadaran terhadap lingkungan.
- j. Adanya kehidupan demokrasi yang matang.



## 2. Negara berkembang dan ciri-cirinya

Negara berkembang atau yang sering disebut *developing countries* atau *third world* (dunia ketiga) merupakan suatu keadaan negara yang masih dalam proses pembangunan. Sebuah negara berkembang diartikan sebagai negara yang masih membutuhkan banyak perubahan dan usaha-usaha peningkatan kesejahteraan yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sumber daya sosial dan teknologi.

### a. Ciri-ciri negara berkembang

1. Dominasi pendapatan terbesar negara berasal dari sektor agraris, maritim, dan industri padat karya (industri yang membutuhkan banyak tenaga kerja). Selain itu juga masyarakatnya mayoritas masih bekerja di bidang agraris meski mulai terjadi transisi menuju ke bidang industri yang lebih maju.
2. Human Development Index pada tingkatan menengah (0.500 - 0.800).
3. Pendapatan per kapita masih tergolong rendah, yaitu diatas \$900 dan di bawah \$11.456.
4. Kualitas dan kuantitas pendidikan masih rendah berdasarkan tingkat melek huruf orang dewasa dan partisipasi dalam dunia pendidikan formal.
5. Tingkat kesehatan yang masih rendah, angka kematian yang cukup tinggi, serta angka harapan hidup yang rendah meski tidak serendah negara miskin. Hal ini disebabkan karena ketersediaan fasilitas kesehatan yang kurang memadai atau tidak terjangkau oleh masyarakat.

6. Kasus korupsi masih banyak terjadi.
7. Masih banyaknya kemiskinan dan pengangguran.
8. Kurang memahami dan menghargai HAM.
9. Penyetaraan gender yang masih rendah.

Mengingat luasnya rentang kriteria tersebut, banyak negara berkembang yang sekarang ini mulai dikenal sebagai negara industri baru (*Newly Industrialized Countries/NICs*). NICs dapat dilihat dari pendapatan per kapita yang sudah cukup tinggi akan tetapi masih belum bisa disebut sebagai negara maju.

### 3. Negara miskin dan ciri-cirinya

Negara miskin atau yang disebut dengan *Undeveloped Countries/ Least Developed Countries* merupakan negara yang gagal dalam menangani kasus kelaparan, kemiskinan, keterbelakangan pendidikan dan kesehatan, konflik dan perang, korupsi yang ekstrim, serta ketidakstabilan kondisi politik dan ekonomi.

Problematika sudah menjadi hal yang wajar dan mudah ditebak. Selain itu, kondisi ekonomi yang buruk sangat memicu jumlah tindak kejahatan di kalangan rakyat. Fasilitas kesehatan yang buruk menjadikan rakyat menderita akibat serangan wabah penyakit yang terus menerus, sementara kurangnya fasilitas pendidikan membuat tidak berkembangnya ilmu pengetahuan dan penalaran pada rakyat, sehingga banyak terjadi penindasan, pemberontakan, dan pemanfaatan oleh pihak yang sewenang-wenang.

Ciri-ciri negara miskin

Berdasarkan *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD)

menyatakan bahwa kriteria suatu negara dikatakan sebagai negara tidak

berkembang/miskin dapat dilihat dari :

1. Pendapatan negara per kapita yang rendah, yaitu dibawah \$900.
2. Aset sumber daya manusia yang lemah, yaitu dilihat dari indeks gabungan atas indikator kesehatan, nutrisi, dan pendidikan.
3. Keadaan ekonomi yang rentan, yaitu didasarkan pada indeks ketidakseimbangan produksi pertanian dan ekspor, ketidacukupan diversifikasi, serta tingkat ekonomi yang rendah.

Data Bank Dunia menunjukkan ada 49 negara yang termasuk dalam negara miskin dan sebagian besar berasal dari Benua Afrika. Penelitian ini memilih sampel negara maju, sedang berkembang dan negara miskin berdasarkan kelompok negara tersebut menurut Bank Dunia.

### **3.3. Definisi Operasional**

#### **3.3.1. Pengendalian Korupsi**

Indikator Pengendalian Korupsi mengukur keberadaan korupsi yang dimanifestasikan oleh kurangnya penghargaan terhadap hukum oleh privat maupun korporasi terhadap pencegahan tindakan korupsi (Kaufmann *et al.* 2006). Konsep yang diukur pada indikator ini adalah kontrol untuk pencegahan dan penindakan terhadap korupsi oleh pegawai publik untuk kepentingan privat, korporasi kecil dan besar dan juga peran elit.

Indikator kontrol atas korupsi dibangun oleh Bank Dunia berdasarkan data yang dirilis oleh *Transparency International Global Corruption Barometer Survey (TI)*, *Global Integrity Index (GII)*, *Standard and Poor's (DRI)*, *The Economic Intelligence Unit (EIU)*, *Politica Risk Services (PRS)*, *World Development Report (WDR)*, *Business Environment Risk Intelligence (BERI)*, *The Wall Street Journal Central European Economic Review (CEER)*, *Freedom House (FH)*, *Gallup International Political Economic Risk Consultancy (PERC)*, *Global Competitiveness Survey (GCS)*, *Global Competitiveness Survey Africa (GCSA)*, dan *The World Competitiveness Yearbook (WTY)*.

Bank Dunia berdasarkan data yang tersedia dari berbagai sumber tersebut merangkum menjadi indeks yang dikeluarkan melalui *Worldwide Government Indicator (WGI)*. Data ini di skor dengan minimal -2,5 yang merupakan indikator negara yang paling korup atau kontrol atas korupsinya paling rendah dan skor tertinggi 2,5 yaitu negara yang paling bersih dari korupsi atau tingkat kontrol atas korupsinya paling tinggi.

Pengendalian Korupsi = Skor Pengendalian Korupsi dari WGI

### **3.3.2. Demokrasi**

Indeks demokrasi diukur dengan Indeks Bank Dunia yang mengindikasikan kualitas dari demokrasi di suatu negara. Ranking dari indeks ini adalah dari -2.5 yaitu yang terendah tingkat demokrasi dan sampai +2.5 yang merupakan skor terbesar yang menunjukkan tingkat demokrasi yang tertinggi di suatu negara. Indikator tingkat demokrasi adalah tingkat proses pemilihan, pengawasan dan

pergantian pemerintahan, tingkat kebebasan pers dan tingkat kebebasan masyarakat dalam berpendapat serta berkumpul. Indikator ini diperoleh Bank dunia dari kumpulan informasi yang sudah dihimpun oleh *The Economist Intelligence Unit (EIU)*, *Freedom House (FH)*, *Political Risk Services (PRS)*, *World Economic Forum (WEF)*, *World Competitiveness Yearbook (WCY)*.

Demokrasi = Skor voice and accountability WGI

### 3.3.3. Efektivitas Pemerintahan

Efektivitas pemerintahan mengukur kemampuan suatu pemerintah untuk menyediakan barang publik, sarana publik dan menghasilkan serta menerapkan kebijakan yang baik (Kaufmann *et al.*, 2006). Penelitian efektivitas pemerintahan menggunakan indikator indeks yang dikeluarkan oleh bank dunia melalui situs *Worldwide Government Indicator (WGI)*. Bank Dunia menghimpun data ini berdasarkan kumpulan data dari *Standard and Poor's (DRI)*, *The Economist Intelligence Unit (EIU)*, *Political Risk Services (PRS)*, *World Development Report (WDR)*, *Business Environment Risk Intelligence (BERI)*, *Freedom House (FH)*, *Global Competitiveness Survey (GCS)*, *Global Competitiveness Survey Africa (GCSA)*, dan *The World Competitiveness Yearbook (WCY)*.

Efektivitas Pemerintahan = skor government effectiveness dari WGI

Skor dari -2,5 yaitu tingkat efektivitas pemerintahan yang paling rendah dan yang tertinggi +2,5 yaitu negara yang pemerintahan paling efektif.

### 3.3.4. Kualitas Regulasi

Indikator ini mengacu pada data indeks dari *Worldwide Government Indicator* yang mengukur kemampuan pemerintah merumuskan dan mengimplementasikan suatu kebijakan yang baik serta regulasi tentang perijinan dan pola pengembangan sektor swasta. Indikator Kualitas Regulasi mengagregasikan berbagai indikator yang mengukur persepsi kemampuan pemerintah dalam kebijakan perijinan dan pengembangan usaha privat dan persepsi itu meliputi:

- a. Keadilan pada persaingan usaha
- b. Ada tidaknya diskriminasi tarif/pajak
- c. Pengendalian harga oleh pemerintah
- d. Proteksi yang berlebihan oleh pemerintah
- e. Kemerdekaan/kebebasan berusaha
- f. Kebijakan anti monopoli
- g. Kebebasan berinvestasi
- h. Kebebasan keuangan
- i. Beban regulator
- j. Konsistensi pajak

Indikator WGI dibangun berdasarkan data dari persepsi berbagai pengusaha dan masyarakat di setiap negara tersebut dan juga pengusaha dan masyarakat yang melakukan aktivitas yang bersinggungan dengan setiap negara yang diukur indikatornya. Surve ini dilakukan setiap tahun oleh Bank Dunia.

Kualitas Regulasi = Skor regulatory quality dari WGI

Skor terendah -2,5 yang menunjukkan kualitas regulasi pemerintah yang paling rendah dan skor tertinggi +2,5.

### 3.4. Alat Analisis

Model analisis untuk menguji hipotesis digunakan analisis data panel. Adapun model ekonometrika yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$PK_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 DM_{it} + \alpha_2 EP_{it} + \alpha_3 KR_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

PK : Pengendalian Korupsi

DM : Demokrasi

EP : Efektivitas Pemerintahan

KR : Kualitas Regulasi

$\epsilon_{it}$  : error term

Analisis yang digunakan analisis regresi data panel. Pengujian data panel ini diperlukan beberapa pengujian (Nachrowi dan Usman , 2006). Pengujian tersebut antara lain uji Hausman, uji Chow dan LM-test. Pengujian-pengujian tersebut untuk menentukan model yang digunakan apakah *Ordinary Least Square* (OLS), *Common Effect*, *Random Effect* atau *Fixed Effect*. Dari beberapa model tersebut akan dipilih salah satu model yang paling tepat untuk mengestimasi regresi data panel.

Uji Chow

Uji ini digunakan untuk memilih model *Common Effect* dengan model *Fixed effect*.

Uji ini dilakukan dengan hasil jika nilai *Prob. Cross-section Chi square* < 0,05

maka akan dipilih *Fixed Effect* serta jika  $> 0,05$  maka akan dipilih *Common Effect* (Baltagi, 2005).

#### Uji Hausman

Uji ini digunakan untuk memilih antara metode *Fixed Effect* atau *Random effect*. Menurut Judge *et al.* (1980) jika Hausman Test menunjukkan nilai Prob dari *Cross-section random* atau *p-value*  $< 0,05$  maka metode yang dipilih *Fixed effect* sedangkan jika  $> 0,05$  maka dipilih metode *Random effect*.

#### Uji Lagrange Multiplier

Uji ini digunakan untuk memilih model yang tepat antara model *Random effect* atau *Common Effect*. Uji ini berdasarkan pada distribusi Chi-square dengan tingkat *degree of freedom*  $k$  yaitu jumlah variabel independen.

#### Uji Asumsi Klasik

Uji ini digunakan untuk menguji apakah data yang telah dikumpulkan memiliki kualitas yang baik. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Jika data yang dikumpulkan memenuhi seluruh uji asumsi klasik maka data tersebut masuk dalam kategori data yang baik (Ghozali, 2013)



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1.Kesimpulan**

1. Tingkat demokrasi berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengendalian korupsi sehingga negara dengan tingkat demokrasi tinggi maka tingkat korupsinya semakin rendah. Tingkat demokrasi berpengaruh terhadap tingkat pengendalian korupsi terutama pada negara miskin dan sedang berkembang sedangkan di negara yang sudah maju karena tingkat demokrasi sudah tinggi maka pengaruh tingkat demokrasi terhadap pengendalian korupsi tidak signifikan lagi.
2. Tingkat efektivitas pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengendalian korupsi sehingga pemerintahan yang efektif dapat mencegah dan mengurangi tindakan korupsi di negara tersebut. Pengaruh efektivitas pemerintahan terhadap tingkat pengendalian korupsi terutama pada negara sedang berkembang. Negara miskin dengan mayoritas pemerintahan otoriter efektivitas pemerintahan rendah sehingga tidak berpengaruh terhadap tingkat pengendalian korupsi sedangkan di negara maju yang sistem/regulasi sudah baik maka peranan pemerintah tidak lagi signifikan sehingga efektivitas pemerintahan di negara maju pengaruhnya terhadap tingkat pengendalian korupsi tidak signifikan.

3. Kualitas regulasi berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengendalian korupsi, hal ini khususnya terjadi di negara maju. Untuk negara miskin dan negara sedang berkembang kualitas regulasi pengaruhnya terhadap tingkat pengendalian korupsi tidak signifikan.

## **5.2. Saran**

1. Penelitian selanjutnya diperluas dengan menambah variabel seperti stabilitas politik, sistem pemerintahan dan menggunakan indeks dari lebih banyak sumber seperti transparansi Internasional, IMF dll.
2. Variabel pengujian diperbanyak seperti variabel ketaatan terhadap hukum karena banyak negara miskin ataupun sedang berkembang yang ketaatan terhadap hukum belum baik demikian pula dengan variabel stabilitas politik yang dapat dijadikan variabel penelitian.

## **5.3. Implikasi**

1. Tingkat demokrasi, efektivitas pemerintahan dan kualitas regulasi mempengaruhi tingkat pengendalian korupsi sehingga bila suatu negara ingin mengendalikan korupsi di negaranya harus meningkatkan 3 variabel tersebut.
2. Negara miskin untuk mengendalikan korupsinya maka yang terutama adalah meningkatkan tingkat demokrasinya yaitu sistem pemerintahan yang demokratis sehingga rakyat benar-benar dapat ikut mengawasi jalannya pemerintahan karena rakyat diberikan hak kebebasan berpendapat, juga adanya kebebasan pers akan ikut mengawasi kegiatan pemerintahan sehingga tingkat pengendalian korupsi dapat meningkat.

3. Negara yang sedang berkembang untuk meningkatkan tingkat pengendalian korupsi harus meningkatkan tingkat demokrasi dan efektivitas pemerintahan. Tingkat demokrasi berupa sistem pemerintahan yang demokratis, adanya kebebasan bersuara dan berpendapat masyarakatnya serta adanya kebebasan media/jurnalistik. Efektivitas pemerintahan adalah penyediaan sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakatnya seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi, pangan karena dengan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat tersebut akan mengurangi tingkat korupsi.
4. Untuk negara-negara maju yang sistem demokrasi dan efektivitas pemerintahan sudah berjalan baik maka tingkat pengendalian korupsi dipengaruhi oleh kualitas regulasi. Regulasi harus benar-benar dibuat dengan lebih mengutamakan untuk kepentingan publik maka tingkat pengendalian korupsi akan meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdiweli, M. Ali and Isse, Hodan S. 2003."Determinants of Economics Corruption: A Cross Country Comparison". *Cato Journal*. Vol.22. No.3 pp.449-466
- Agus Widarjono. 2007."Ekonometrika Teori dan Aplikasi". Yogyakarta: Ekonesia FE UII
- Aktan C.C. 2001."Political Ethics and Political Corruption", *Journal Anti Corruption Strategies* pp. 51-59
- Amadou, N., Sow., M., 2017 "Does Good Governance Matter More for Energy Investment? Evidence for Sub-Saharan Africa", *IMF Research Bulletin*.
- Bai dan Wei. 2000." Quality of Bureaucracy and open economy macro policies". *NBER Working Paper No.7766*.
- Brewer, G., Choi, Y., Walker, R., 2007. "Accountability, Corruption and Government Effectiveness in Asia : An Exploration of World Bank Governance Indicators". *International Public Management Review*. Vol. 8 Issue 2.
- Churchill R.Q., Agbodohu W. And Arhenful P. 2013. " Determining Factors Affecting Corruption: A Cross Country Analysis" *International journal of Economics, Business and Finance*. Vol. 1 No.10 November, pp. 175-285.
- Donaldson, L., and Davis, J.H. 1989. "CEO Governance and Shareholder Returns : Agency Theory or Stewardship Theory". Paper presented at the annual meeting of the Academy of Management, Washington,DC.
- Effendi, Sofyan, *Sistem Pemerintahan Negara Kekeluargaan*, Pidato Dies Natalis XVIII Universitas Wangsa Manggala, Yogyakarta, 09 Oktober 2004
- Eisenhardt, Kathleem. 1989."Agency Theory : An Assesment and Review." *Academy of Management Review*, 14:57-74.

- Elbasani A. and Sabic S.S. 2017."Rule of Law, Corruption and Democratic Accountability in The Course of EU Enlargement" *Journal of European Public Policy*. May. pp. 1-27.
- Fackler T. dan Lin T. 1995."Political Corruption and Presidential Elections". *Journal of Politics*. Vol. 7. Pp.971-993 .
- Farooq, A., Shabaz, M., Arouri, M. And Teulon, F.2013. "Does Corruption Impede Economic Growth in Pakistan?" *Economics Modelling*,35, 622-633.
- Fleishman R., Alexander R., Bretschneider and Popp. 2009." Does Regulation Stimulate Productivity? The Effect of air quality policies on the efficiency of US power plants". *Energy Policy*. Vol.37 Issue 11 Nov. 2009. Pp.4574-4582.
- Ghozali, Imam. 2013. "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS." Edisi Ketujuh. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Glynn, Kobrin, Stephen J., and Naim M. 1997. "The Globalisation of Corruption" *Journal Corruption and Global Economy*, Vo.4. pp. 7-27.
- Gupta, S., Davoodi, H. And Alonso-Terme,R. 2002. "Does Corruption Affect Income Inequality and Poverty?" *Economics of Governance*,3,23-45
- Huynh, Kim P. dan David T. Jacho-Chavez.2009. "Growth and Governance : A Nonparametric Analysis", *Journal of Comparative Economics* 37: 121-143
- Jensen and Meckling. 1976. "The Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure". *Journal of Financial and Economics*, 3: 305-360.
- Kaufmann D. dan Krany. 2002." Growth without Governnace". *Economica*. Vol.3 pp.196-230.
- Kaufmann, D., Kraay, A., Mastruzzi, M. 2006. "Governance Matters V: Aggregate and Individual Governance Indicators for 1996-2005. World Bank
- Lederman D, Loayza N.V. and Soarn R.R. 2005."Accountibility and Corruption: Political Institutions Matter". *Economic and Politics*. Vol.7 pp.1-35.
- Lembaga Administrasi Negara.2000."Akuntabilitas dan Good Governance" Jakarta. LAN. RI.

- Liu X. 2016. A Literature Review on the Definition of Corruption and Factors Affecting the Risk of Corruption. *Open Journal of Social science*. Pp.171-177.
- Lubis, Mochtar dan Scott, James C., 1993. "Korupsi Politik", Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Mauro, P. 1995. "Corruption and Growth", *The Quarterly Journal of Economics* 110(3): 681-712
- Mulyadi, 2002."Auditing" Buku 1 Universitas Gadjah mada, Edisi 1. Salemba Empat.
- Nachrowi, Usman, H., 2006 "Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan" Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi
- Santosa, Pandji. 2008. "Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance." Bandung. Refika Aditama
- Scott, W.R. 2006. "Financial Accounting Theory", *Pearson Prentice Hall*, Canada
- Sedaryanti, 2009. "Reformasi Adminstrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemimpinan yang Baik). Bandung. *Rafika Aditama*.
- Shabbir G. dan Anwar M. 2007." Determinants of Corruption in Developing Countries". *The Pakistan Development Review*. 46;4 part II (winter) pp.751-764.
- Susanto, D., Yusuf, D., Rachmawati, Y., 2014 "Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kualitas Pemberian Layanan Publik", *Jurnal Paradigma* Vol 12, No. 02
- Sutedi, Adrian. 2011. "Good Corporate Governance", Jakarta : Sinar Grafika
- Treisman D. 2000. " The Causes of Corruption: a Cross-National Study. *Journal of public Economics*. 76.pp. 399-457.
- Turedi S., and Altiner A. 2016."Economics and Political Factors Affecting Corruption in Developing Countries". *International journal Economics Reaources*.pp. 104-120.
- UNDP, 1997." Human Development Report 1997". New York-Oxford. Oxford University Press.

Wolk, H.I., Dodd, J.L and Rozycki, J.J. 2008. "Accounting Theory, seventh edition." *Sage Publication, Inc.* California

[www.govindicators.org](http://www.govindicators.org) diakses pada tanggal (3 Januari 2019)